

Pohon Kinerja

Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029

Ultimate Outcome

Intermediate Outcome

Immediate Outcome

Output

Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah
IK: Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Meningkatnya Kualitas Kebijakan
IK: Indeks Kualitas Kebijakan (IK)

Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Pemerintah
IK: 1. Nilai Hasil Evaluasi AKIP Komponen Pelayanan
IK: 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persepsi Warga

Ultimate Outcome

Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Kebijakan Urusan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
IK: 1. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
IK: 2. Persentase Tindaklanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitas
IK: 3. Indeks Reformasi Hukum
IK: 4. Persentase Penerimaan Kerja Sama (PKS) yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Kebijakan Urusan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
IK: 1. Tingkat Inflasi
IK: 2. Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah
IK: 3. Indeks Tata Kelola Pengadaan
IK: 4. Persentase Tindaklanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitas

Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja Pemerintah Daerah
IK: 1. Indeks Kemangatan Organisasi Perangkat Daerah
IK: 2. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah
IK: 3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik

Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah
IK: 1. Persentase Penetapan Cakupan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat
IK: 1. Persentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan

Meningkatnya Fasilitas dan Harmonisasi Produk Hukum
IK: 1. Persentase Produk Hukum yang difasilitasi dan ditindaklanjuti

Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kerja Sama Daerah
IK: 1. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kerja Sama Daerah

Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Urusan Pemerintahan
IK: 1. Persentase Kebijakan Fasilitas Kebijakan Urusan Pemerintahan yang Ditindaklanjuti

Meningkatnya Capaian Pembangunan pada Perangkat Daerah
IK: 1. Persentase Realisasi Fisik yang Berkualitas

Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
IK: 1. Tingkat Kemungkinan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA)
IK: 1. Persentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA)

Meningkatnya Kualitas Penataan Organisasi Pemerintah Daerah
IK: 1. Nilai Efektivitas Kemangatan Organisasi
IK: 2. Persentase PD yang mendapatkan Hasil Efektif AKIP >= 70 (BB)
IK: 3. Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat >= 88,31 (Sangat Baik)

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah
IK: 1. Terselenggaranya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
IK: 2. Terselenggaranya Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Meningkatnya Fasilitas Kurunmanggahan Sekretariat Daerah dan KCMWCHD
IK: 1. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah
IK: 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik

Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Protokol, Tamu dan Fasilitas Pimpinan
IK: 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

1. Terselenggaranya Penataan Administrasi Pemerintahan
IK: Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan

1. Terselenggaranya Analisis Pengambilan Bina Mental Sprituali
IK: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengambilan Bina Mental Sprituali

1. Terselenggaranya Fasilitas Bantuan Hukum
IK: Jumlah Produk Hukum yang Ditindaklanjuti

1. Terselenggaranya Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri
IK: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri

1. Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLD
IK: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLD

1. Terselenggaranya Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan
IK: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan

1. Terselenggaranya Pengadaan dan Distribusi Perbekalan Secara Elektronik
IK: Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik

1. Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pembangunan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati, Perencanaan, Statistik, Perencanaan
IK: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pembangunan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati, Perencanaan, Statistik, Perencanaan

1. Terselenggaranya Pengelolaan Kelengkapan dan Analisis Jabatan
IK: Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelengkapan dan Analisis Jabatan

1. Terselenggaranya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
IK: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1. Terselenggaranya Fasilitas Komunikasi Pimpinan
IK: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan

1. Terselenggaranya Fasilitas Kelembagaan
IK: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kelembagaan

1. Terselenggaranya Penetapan Administrasi Pemerintahan
IK: Jumlah Dokumen Hasil Penetapan Administrasi Pemerintahan

1. Terselenggaranya Analisis Pengambilan Bina Mental Sprituali
IK: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengambilan Bina Mental Sprituali

1. Terselenggaranya Fasilitas Bantuan Hukum
IK: Jumlah Produk Hukum yang Ditindaklanjuti

1. Terselenggaranya Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri
IK: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri

1. Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLD
IK: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLD

1. Terselenggaranya Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan
IK: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan

1. Terselenggaranya Pengadaan dan Distribusi Perbekalan Secara Elektronik
IK: Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik

1. Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pembangunan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati, Perencanaan, Statistik, Perencanaan
IK: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pembangunan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati, Perencanaan, Statistik, Perencanaan

1. Terselenggaranya Pengelolaan Kelengkapan dan Analisis Jabatan
IK: Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelengkapan dan Analisis Jabatan

1. Terselenggaranya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
IK: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1. Terselenggaranya Fasilitas Komunikasi Pimpinan
IK: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan

1. Terselenggaranya Fasilitas Kelembagaan
IK: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kelembagaan

1. Terselenggaranya Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Teknik Kelengkapan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kesehatan dan Keluarga
IK: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Teknik Kelengkapan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kesehatan dan Keluarga

1. Terselenggaranya Fasilitas Bantuan Hukum
IK: Jumlah Produk Hukum yang Ditindaklanjuti

1. Terselenggaranya Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri
IK: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri

1. Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLD
IK: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLD

1. Terselenggaranya Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan
IK: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan

1. Terselenggaranya Pengadaan dan Distribusi Perbekalan Secara Elektronik
IK: Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik

1. Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pembangunan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati, Perencanaan, Statistik, Perencanaan
IK: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pembangunan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati, Perencanaan, Statistik, Perencanaan

1. Terselenggaranya Pengelolaan Kelengkapan dan Analisis Jabatan
IK: Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelengkapan dan Analisis Jabatan

1. Terselenggaranya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
IK: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1. Terselenggaranya Fasilitas Komunikasi Pimpinan
IK: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan

1. Terselenggaranya Fasilitas Kelembagaan
IK: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kelembagaan

1. Terselenggaranya Fasilitas Kelembagaan
IK: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kelembagaan

1. Terselenggaranya Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Teknik Kelengkapan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kesehatan dan Keluarga
IK: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Teknik Kelengkapan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kesehatan dan Keluarga

1. Terselenggaranya Fasilitas Bantuan Hukum
IK: Jumlah Produk Hukum yang Ditindaklanjuti

1. Terselenggaranya Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri
IK: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri

1. Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLD
IK: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLD

1. Terselenggaranya Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan
IK: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan

1. Terselenggaranya Pengadaan dan Distribusi Perbekalan Secara Elektronik
IK: Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik

1. Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pembangunan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati, Perencanaan, Statistik, Perencanaan
IK: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pembangunan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati, Perencanaan, Statistik, Perencanaan

1. Terselenggaranya Pengelolaan Kelengkapan dan Analisis Jabatan
IK: Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelengkapan dan Analisis Jabatan

1. Terselenggaranya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
IK: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1. Terselenggaranya Fasilitas Komunikasi Pimpinan
IK: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan

1. Terselenggaranya Fasilitas Kelembagaan
IK: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kelembagaan

1. Terselenggaranya Fasilitas Kelembagaan
IK: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kelembagaan

1. Terselenggaranya Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Teknik Kelengkapan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kesehatan dan Keluarga
IK: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Teknik Kelengkapan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kesehatan dan Keluarga

1. Terselenggaranya Fasilitas Bantuan Hukum
IK: Jumlah Produk Hukum yang Ditindaklanjuti

1. Terselenggaranya Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri
IK: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri

1. Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLD
IK: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLD

1. Terselenggaranya Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan
IK: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan

1. Terselenggaranya Pengadaan dan Distribusi Perbekalan Secara Elektronik
IK: Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik

1. Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pembangunan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati, Perencanaan, Statistik, Perencanaan
IK: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pembangunan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati, Perencanaan, Statistik, Perencanaan

1. Terselenggaranya Pengelolaan Kelengkapan dan Analisis Jabatan
IK: Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelengkapan dan Analisis Jabatan

1. Terselenggaranya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
IK: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1. Terselenggaranya Fasilitas Komunikasi Pimpinan
IK: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan

1. Terselenggaranya Fasilitas Kelembagaan
IK: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kelembagaan

1. Terselenggaranya Fasilitas Kelembagaan
IK: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kelembagaan

**CASCADING
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**



URUSAN	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		
PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Perekonomian dan Pembangunan
SASARAN PROGRAM	Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan
INDIKATOR PROGRAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kematangan Organisasi 2. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah 3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2. Persentase tindaklanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitasi 3. Indeks Reformasi Hukum 4. Persentase Perjanjian Kerja Sama yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Inflasi 2. Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah 3. Indeks Tata Kelola Pengadaan Persentase Tindaklanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitasi
KEGIATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penataan Organisasi 2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 9. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan 2. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 3. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 4. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 2. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 3. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 4. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

SASARAN KEGIATAN

1. Meningkatnya Kualitas Penataan Organisasi Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan keuangan sekretariat daerah
3. Meningkatnya fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dan KDH/WKDH
4. Meningkatnya Efektivitas pelayanan protokol, tamu dan fasilitasi pimpinan

1. Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat
3. Meningkatnya Fasilitasi dan Harmonisasi Produk Hukum
4. Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kerjasama Daerah

1. Meningkatnya Efektivitas kebijakan urusan Perekonomian
2. Meningkatnya Capaian Pembangunan pada Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa
4. Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Urusan SDA

SUB KEGIATAN

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
8. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
9. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
10. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
11. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
12. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
13. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
14. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
16. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan
2. Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
3. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
4. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
6. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
7. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat
8. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing
9. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
10. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
11. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
12. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
13. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
14. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
2. Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
3. Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
4. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD
5. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan
6. Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
7. Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
8. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
9. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
10. Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
11. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
12. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
13. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

SUB
KEGIATAN

17. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
18. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
19. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
20. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
21. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis
22. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
23. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
24. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
25. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
26. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya
27. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
28. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
29. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
30. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
31. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
32. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
33. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
34. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
35. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
36. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan

SUB
KEGIATAN

37. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
38. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
39. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
40. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
41. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
42. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
43. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
44. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
45. Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
46. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
47. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
48. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
49. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
50. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
51. Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
52. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
53. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
54. Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
55. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
56. Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

CROSSCUTTING

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

TAHUN 2025-2029

VISI : SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU

Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegrasi dan Akuntabel

Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah
Indikator : Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah

Indikator :
Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Pemerintah

Indikator :
1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komponen Pelaporan
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Pemerintah Kota

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Indikator :

1. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
2. Persentase Tindakanlanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitas
3. Indeks Reformasi Hukum
4. Persentase Perjanjian Kerja Sama yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Indikator :

1. Tingkat Inflasi
2. Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah
3. Indeks Tata Kelola Pengadaan
4. Persentase Tindakanlanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitas

Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah

Indikator :

1. Indeks Kematangan Organisasi
2. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (KIM)

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Stakeholder Internal	Stakeholder Eksternal	Fasilitasi Stakeholder
Bagian Tata Pemerintahan	Kecamatan, Kelurahan, Instansi Vertikal	Koordinasi Pemerintahan, Pembinaan Administrasi Kewilayahan
Bagian Kesejahteraan Rakyat	Lembaga Sosial, Masyarakat Umum, OPD Terkait	Fasilitasi Kegiatan Sosial, Pendidikan, Kesehatan Masyarakat
Bagian Hukum	Penyusunan Produk Hukum Daerah, Dokumentasi Hukum, Konsultasi Hukum	DPRD, OPD, Masyarakat, Lembaga Hukum
Bagian Kerja Sama	Kerjasama Daerah, Nasional, dan Luar Negeri	Pemerintah Daerah Lain, Pemerintah Pusat, Lembaga Non Pemerintah

Stakeholder Internal	Stakeholder Eksternal	Fasilitasi Stakeholder
Bagian Perekonomian	Pelaku Usaha, OPD Teknis, BUMD, BLUD, BUMN	Koordinasi Kebijakan Ekonomi, Daerah, Pembinaan BUMD, dan BLUD, UMKM
Bagian Administrasi Pembangunan	Seluruh OPD dan OPD Pengusul	Pelayanan Terhadap Pelaporan Progres, Pekerjaan Perangkat Daerah, Pelayanan Terhadap, Fasilitasi Terkait Pembangunan
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	OPD Pengusul, Penyedia Barang/Jasa, Layanan Masyarakat	Pelayanan Pengadaan, Pemilihan Penyedia, Fasilitasi UKPBJ
Bagian Sumber Daya Alam	OPD Teknis, Instansi Pusat, Masyarakat Lokal	Koordinasi Pengelolaan SDA, Sinkronisasi Data dan Dokumen Hubungan Dengan Instansi Terkait

Stakeholder Internal	Stakeholder Eksternal	Fasilitasi Stakeholder
Bagian Organisasi	Perangkat Daerah, ASN, Kepala Daerah, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, BKN, dan Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Akuntabilitas, Kinerja, Reformasi Birokrasi, Analisis Jabatan dan Beban Kerja, Evaluasi Kolaborasi, Fasilitasi Pelayanan Publik, dan Ketatalaksanaan
Bagian Perencanaan dan Keuangan	Perangkat Daerah, Bapperida, Inspektorat, BPKAD	Perencanaan Program, Penganggaran, Pelaporan Kinerja dan Keuangan
Bagian Umum	Seluruh Perangkat Daerah, ASN	Pelayanan Kantoran, Rumah Tangga, Penfungsip, Perjalanan Dinas
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kepala Daerah, Media Masyarakat	Pelayanan Keprotokolan, Dokumentasi Kegiatan Pimpinan, Hubungan Media